

# **EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BIDANG TANAMAN PANGAN TAHUN 2010-2014 DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BLITAR**

**MAT SAFI'I**

## **ABSTRAK**

Pembangunan Pertanian memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. Komoditi tanaman pangan merupakan salah satu bagian utama dari sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1). Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Bidang Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (2). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, melalui penggunaan metode penelitian kualitatif ini, peneliti berharap dapat menggambarkan dan membahas bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan pertanian bidang tanaman pangan tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan pertanian bidang tanaman pangan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar adalah (1). Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan. (2). Menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dan terselurnya benih tanaman bersubsidi. (3). Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi penerapan budidaya tanaman yang tepat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah mundurnya jadwal tanam, adanya perubahan kebijakan dari pusat, respon petani terhadap padi hibrida masih rendah, terlambatnya penyaluran benih dari penyedia benih, terbatasnya tenaga pendamping dan tenaga administrasi dan sumberdaya petani yang masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : evaluasi, program, pertanian, tanaman pangan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komoditas tanaman pangan diupayakan selalu tersedia dalam keadaan cukup, hal ini untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri, dimana setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri.

Kondisi pangan yang cukup, mantap dan stabil serta terakses dengan baik merupakan kondisi ketahanan pangan yang tangguh. PP RI No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangkapembangunan nasional

untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan: 1) mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, 2) mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, 3) mengembangkan teknologi produksi pangan, 4) mengembangkan sarana dan

prasarana produksi pangan, dan 5) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, koperasi, permukiman dan prasarana wilayah, pemerintahan dalam negeri, keuangan, dan riset dan teknologi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pembangunan Ketahanan Pangan berdasarkan hal di atas merupakan salah satu hal mendasar yang harus dilakukan dalam pembangunan nasional. Sistem dalam Ketahanan Pangan terdiri dari 3 subsistem yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi yang saling berkaitan. Subsistem ketahanan pangan yang pertama yaitu ketersediaan pangan perlu didukung oleh produksi nasional yang mantap. Produksi nasional yang mantap akan memperkokoh ketersediaan pangan di masyarakat.

Sehubungan dengan ketersediaan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu lembaga penting yang menangani produksi tanaman pangan yang terkait dengan makanan pokok penduduk Indonesia. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai Tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang tanaman pangan. Sedangkan Fungsinya adalah: 1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan 5)

Pelaksana Administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pengembangan komoditas tanaman pangan selama tahun 2010-2014 masih berfokus pada padi, jagung dan kedelai. Selama periodetersebut produksi padi, jagung dan kedelai diharapkan naik rata-rata 5,22persen, 10,02 persen, dan 20,05 persen. Sasaran tersebut ditetapkan dengan terjadinya swasembada padi tahun 2007, jagung tahun 2008 dan kedelai tahun 2014.

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi semakin kompleks karena berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluar sektor pertanian yang amat berpengaruh dalam peningkatan produksi pangan, antara lain dampak fenomena iklim (DFI), semakin berkurangnya ketersediaan lahan produksi untuk tanaman pangan akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ketersediaan air irigasi karena sumber-sumber air yang semakin berkurang dan persaingan penggunaan air diluar sektor pertanian (industri dan pemukiman) serta laju pertumbuhan penduduk.

Masalah subsektor tanaman pangan khususnya padi, jagung, kedelai dan kacang tanah adalah adanya kesenjangan produktivitas ditingkat petani yang cukup besar, dibanding potensi yang dapat dicapai petani. Penyebabnya antara lain penggunaan benih unggul varietas potensi tinggi dan bersertifikat ditingkat petani masih rendah sekitar 53%, penggunaan pupuk yang belum berimbang dan efisien, penggunaan pupuk organik yang belum populer, budidaya spesifik lokasi masih belum berkembang, pendampingan penyuluh, POPT, PBT dan peneliti belum optimal, lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan/ pembiayaan usaha serta pasar dll.

Melihat besarnya tantangan dan masalah dalam produksi tanaman pangan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan dibutuhkan sinergi perencanaan program dengan pembiayaan yang dilakukan melalui hubungan koordinasi antara

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan UPT Pusat dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani tanaman pangan.

Koordinasi ini dilakukan terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bersama, khususnya pembangunan yang dibiayai APBN. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai hubungan hierarki dengan provinsi dan kab/kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan azas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan (Ditjen TP, 2012: 51).

Dinas Pertanian Kabupaten Blitar sebagai daerah yang berpotensi dalam bidang pertanian termasuk tanaman pangan, dalam hal ini yang menangani urusan pertanian mempunyai hubungan hirarki dan koordinasi dengan Direktorat Tanaman Pangan. Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9% dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian.

Dengan keunggulan komparatif sebagai daerah agraris penghasil komoditas tanaman pangan dan hortikultura, maka pembangunan pertanian diletakkan sebagai salah satu prioritas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat dominasi sektor pertanian dalam pembentukan angka PDRB cukup signifikan yaitu sekitar 46% dengan sumbangan porsi dari pertanian bahan makanan sebesar 19%. Tanaman pangan mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan pertanian,

karena sebagai bahan pangan bagi masyarakat terutama beras, dan singkong sebagai tambahan. Demikian juga besarnya peternakan ayam di Blitar memerlukan pakan terutama dari produksi jagung. Karena itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian dan dipertahankan bahkan ditingkatkan hasilnya guna mencapai sasaran produksi yang berkelanjutan, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan yang tangguh.

Walaupun ketersediaan pangan pokok sudah mandiri, tetapi produksi pangan yang mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Blitar menghadapi tantangan yang cukup besar antara lain adanya alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit tumbuhan, dampak fenomena iklim, ketersediaan air untuk pertanian, laju pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Blitar selama sekitar 5 tahun terakhir mencapai 20 hektar dari total lahan sawah 31.725 ha, sehingga luas lahan sawah pada tahun 2011 ini sebesar 31.705 ha, sementara itu banyak petani yang mengeluh tentang perubahan iklim yang ekstrim dan ketersediaan air yang semakin berkurang yang berpengaruh terhadap produksi pangan mereka.

Produksi pangan terutama makanan pokok memang sudah mencukupi kebutuhan, tetapi apabila dilihat dari angka rata-rata kenaikan produksi selama 5 tahun yaitu tahun 2005-2009 terdapat hal yang perlu diwaspadai yaitu peningkatan produksi pangan yang tidak terlalu signifikan, bahkan terdapat penurunan produksi pada komoditas ubi kayu.

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu Terwujudnya Produksi Pangan Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan, dan melihat adanya hubungan hirarki dan manajemen strategi antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar serta melihat pentingnya pelaksanaan rencana strategis dari Direktorat Tanaman Pangan untuk mencapai tujuan pembangunan tanaman pangan, maka

penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Bidang Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar?
2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian tanaman pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten. Blitar khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar untuk melaksanakan programnya dalam rangka mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif ini, peneliti berharap dapat menggambarkan dan membahas bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan pertanian bidang tanaman pangan tahun 2010-2014 di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bungin (2001: 48) penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Selanjutnya disebutkan untuk format deskriptif studi kasus tidak memiliki ciri-ciri pemairan (menyebarkan ke permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai variabel.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* (penjelajahan umum), sehingga peneliti memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono, 2010: 34). Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, peneliti dapat mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan data yang relevan (Moleong, 2011: 94). Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Pertimbangan peneliti untuk memilih Kabupaten Blitar adalah karena Kabupaten Blitar merupakan daerah yang mempunyai potensi dalam bidang

pertanian yang besar karena sekitar 46% sumbangan PDRB Kabupaten Blitar berasal dari sektor pertanian.

Situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti dapat menangkap atau melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari objek yang diteliti. Situs penelitian pada penelitian ini berdasarkan obyek penelitian yaitu pada bidang pertanian adalah Kantor Dinas Pertanian Kab. Blitar terutama pada Bidang Tanaman Pangan. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2014

#### **D. Sumber Data**

Pada penelitian ini sumber data berasal dari dokumen, informan, tempat dan peristiwa. Penelitian ini membutuhkan dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Bidang Tanaman Pangan di Kabupaten Blitar yaitu antara lain berupa laporan kegiatan, surat, foto, juknis, juklak dll. Informan adalah orang yang dianggap tepat dan dapat dipercaya memberikan data dan keterangan yang berguna untuk mengungkap suatu fenomena. Sebagai pendahuluan dipilih informan awal yang benar-benar relevan dan kompeten dalam memberikan informasi sesuai masalah penelitian ini yaitu Kepala Bidang Tanaman Kabupaten Blitar. Selanjutnya peneliti meminta kepada informan awal memberikan keterangan dan data serta menunjuk orang lain yang juga dapat memberikan informasi dan data yang lebih detail. Tempat dan peristiwa diobservasi pula dalam penelitian ini yang juga didasarkan pada masalah dan fokus penelitian.

#### **E. Teknik Pengambilan Data**

Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2010: 62). Menurut Prastowo (2011: 208) tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan. Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

##### **1. Dokumentasi**

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Pohan dalam Prastowo, 2011: 226).

##### **2. Wawancara**

Wawancara menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 72) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback dalam Sugiyono (2010: 72) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

#### **F. Analisis Data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data Miles and Huberman. Miles and Huberman (2009: 15-20) mengemukakan bahwa analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

##### **2. Penyajian data**

Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian data bisa berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan yang semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan anggaran dan kegiatan dari tahun 2010 sampai bulan Juni 2014 sebagai berikut:

### **A. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan.**

Secara umum program dan kegiatan program pembangunan pertanian bidang tanaman pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar pada tahun 2010 yang dilaksanakan, secara anggaran terealisasi seluruhnya (100%), sementara dari segi kegiatan juga terimplementasi. Tahun 2011 secara rencana anggaran implementasinya mencapai 96,57%, sementara dari segi rencana kegiatan juga terimplementasi kecuali untuk kegiatan komoditas kacang tanah, karena adanya perubahan kebijakan di tingkat Pusat. Pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sampai 2013 secara anggaran terealisasi seluruhnya (100%), sementara dari segi kegiatan juga terimplementasi. Sedangkan tahun 2014 sampai bulan Juni anggaran sudah terimplementasi sebesar 80,33%. Sedangkan dari segi rencana kegiatan juga baru sebagian terimplementasi. Walaupun sebagian besar rencana kegiatan telah terimplementasi, tetapi masih terdapat kegiatan yang tidak

sesuai juknis karena keadaan di lapangan, contohnya: 1) kelompok tani yang mengikuti SLPTT beberapa kali, padahal menurut juknis seharusnya yang diutamakan yang belum pernah mengikuti SLPTT; dan 2) adanya peserta pelatihan PLIII dari mantri tani, yang seharusnya menurut juknis berasal dari unsur POPT, PPL atau PBT.

### **B. Menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dan tersalurkannya benih tanaman bersubsidi.**

#### **a. Penyelenggaraan sistem penyediaan benih**

Secara umum kegiatan penyelenggaraan benih tahun 2010 sampai 2013 secara anggaran sudah terealisasi 100%. Pada tahun 2010 terdapat kegiatan pengembangan perbenihan penangkaran benih padi yang berdasarkan pengawasan Itjen Kementerian Pertanian, kegiatan belum dilengkapi dengan petunjuk teknis dan TOR sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Salah satu cara untuk memahami tugasnya adalah menjabarkan pedoman pelaksanaan yang sudah dibuat oleh Pusat menjadi juknis, sehingga operasional kegiatan menjadi lebih jelas. Hal ini berimplikasi dengan identifikasi CPCL yang kurang cermat, sehingga terdapat kegiatan penangkaran yang dikelola oleh salah satu anggota kelompok (perorangan) yang telah memiliki sarana/prasarana kegiatan penangkaran. Laporan kelompok tani lebih ke arah administrasi dan keuangan, hasil dan tahapan kegiatan tidak dilaporkan secara tertulis. Sehingga secara tertulis tidak diketahui hasil dari kegiatan penangkaran benih padi ini.

Kegiatan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan tahun 2010 berupa pengawalan, pembinaan dan monitoring evaluasi bantuan benih. Kegiatan tidak melibatkan kelompok tani

karena kegiatan berupa pelaporan dan perjalanan untuk pengawalan, pembinaan, movev penyaluran BLBU. Kegiatan ini penting karena penyaluran BLBU memerlukan kawalan dari pelaksana kabupaten, pengawalan, pembinaan dan monitoring evaluasi bantuan benih tahun 2011 baik secara anggaran dan kegiatan telah terlaksana.

Perhatian untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan tahun 2011 sampai 2012 dari Pusat lebih besar lagi, terlihat dari alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya dan dengan subkegiatan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kegiatan pemberdayaan benih padi tahun 2011 dan 2012 secara anggaran telah diserap 100%, Sedangkan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 kegiatan penangkaran benih tidak ada.

#### **b. Penyaluran BLBU oleh PSO**

Pengadaan BLBU di tingkat Pusat pada tahun 2010-2011 melalui penunjukkan langsung yaitu PT Pertani dan PT SHS. Sedangkan pada tahun 2012 yang semula berupa bantuan langsung masyarakat diharapkan langsung masuk rekening kelompok tani yang nantinya digunakan petani untuk membeli benih sendiri, sudah tercantum pada DIPA awal yaitu pada DIPA No. 5940/018-03.4.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 sesuai dengan masukan dari bawah termasuk dari Dinas Pertanian Kab. Blitar yang mengharapkan pengadaan benih berupa BLM agar varietas sesuai dengan keinginan petani dan penanaman dapat dilakukan tepat waktu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata terjadi perubahan yang dikabarkan karena adanya isu berbagai kepentingan politik. Pengadaan benih ini ternyata tidak disetujui oleh DPR karena dikuatirkan petani kurang mampu untuk mengadakan benih unggul. DPR khawatir benih yang dibeli petani tidak sesuai spesifikasinya berupa benih unggul yang berkualitas. Sehingga akhirnya pengadaan benih berupa lelang. Dan turunlah DIPA Revisi ke-2 tanggal 29 Pebruari 2012, anggaran

untuk BLM benih dicabut. Hal inilah yang disebut informan bahwa dalam perubahan proses pengadaan benih ini terdapat isu berbagai kepentingan politik. Pengaruh yang terutama memegang peranan dalam pengambilan keputusan birokratik ialah tekanan politik dan tekanan elit (Salusu, 2006: 75).

Proses lelang ini ternyata juga kurang berjalan lancar, pada lelang pertama yang dilakukan pada bulan Januari 2012 tidak ada yang memenuhi spesifikasi sehingga diadakan lelang kedua pada bulan Pebruari yang pemenangnya diumumkan pada akhir Maret 2012. Sehingga proses penyaluran benih tidak dapat secepatnya dilaksanakan. Lelang pengadaan benih ini dimenangkan oleh BUMN PT SHS untuk 4 paket dan PT HNW (swasta) untuk 1 paket.

Pada tahun 2010 jumlah kebutuhan benih yang diperlukan untuk areal SLPTT untuk komoditas padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai 394.500 kg, tahun 2011 sebesar 454.475 kg, dan tahun 2012 sebesar 502.950 kg. Secara jumlah, penyaluran BLBU kepada petani peserta SLPTT pada tahun 2010-2012 ini tercapai 100%. Berdasar angka realisasi, secara umum penyaluran benih untuk areal lahan SLPTT untuk tahun 2010-2012 telah sesuai rencana. Berbeda dengan pelaksanaan bantuan benih tahun 2013-2014, pola bantuan benih dalam bentuk subsidi benih dimana petani harus membeli benih dengan harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pola subsidi ini memberikan dampak kepada petani, karena petani sudah terbiasa pada tahun sebelumnya dengan benih gratis, sehingga perlu penyadaran kepada petani. Tidak semua kelompok tani mengambil subsidi benih ini, untuk tahun 2013 realisasi subsidi 65% dari rencana, sedangkan tahun 2014 ini sampai dengan akhir Juni 2014 sudah terealisasi sekitar 30%.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan bantuan benih terdapat beberapa kendala antara lain ketersediaan stok yang berpengaruh

pada keterlambatan penyaluran, daya tumbuh yang kurang baik, dan jenis varietas yang disediakan oleh PSO terbatas. Hal inilah yang mungkin mendasari perbaikan proses pengadaan benih di Tingkat Pusat, sehingga terjadi pergantian sistem pengadaan benih.

### **C. Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi penerapan budidaya tanaman yang tepat.**

Secara umum baik dari segi anggaran dan kegiatan, bantuan sarana pasca panen tahun 2010-2013 terimplementasi sesuai rencana. Demikian juga kegiatan bimbingan teknis penanganan pasca panen 2011-2013 juga terimplementasi 100%, dari segi anggaran tahun 2011-2013 terealisasi 100%, sedangkan tahun 2014 kegiatan penanganan pascapanen dialihkan ke provinsi dan informasi pada pertengahan Juni 2014 kegiatan tersebut ditiadakan karena adanya kebijakan dari pusat terkait penghematan anggaran.

## **PERMASALAHAN**

### **1. Mundurnya Jadwal Tanam**

Berdasarkan data dari Calon Petani dan dan Calon Lokasi (CPCL) sebagian besar jadwal tanam pada bulan Oktober s/d Desember (Musim Hujan, sehingga dengan jadwal tersebut kegiatan yang dilaksanakan tidak akan panen pada tahun berjalan dan secara otomatis tidak dapat berkontribusi produksi pada tahun berjalan juga

### **2. Adanya Perubahan kebijakan dari Pusat**

Setiap tahun anggaran masih terjadi perubahan kebijakan dari Pusat seperti misalnya pada tahun 2011 Dem Ubi Jalar dan Padi Hibrida (bisa dilihat pada hasil penelitian Tahun 2011), tahun 2012 terdapat penundaan untuk Padi Hibrida sehingga menghambat penyerapan dari daerah dan berimplikasi anggaran yang harus diserap di akhir tahun menjadi besar, tahun 2013 adanya

perubahan pola SLPTT ke pola kawasan sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensi ke pelaksana program di tingkat lapangan termasuk perubahan bantuan langsung benih unggul (BLBU) ke subsidi benih, dimana pada BLBU benih gratis diterima kelompok sedangkan subsidi benih petani harus membeli dengan harga yang disubsidi pemerintah. Pada tahun 2014 adanya perubahan kegiatan penanganan pascapanen, dimana yang awalnya anggaran menempel di Dinas Pertanian Kabupaten Blitar kemudian dialihkan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tlimur dan pada saat ada kebijakan penghematan anggaran dari pusat kegiatan tersebut dihilangkan.

### **3. Respon petani terhadap Padi Hibrida masih rendah**

Salah satu usaha dalam rangka peningkatan produktifitas padi adalah dengan menggunakan benih padi varietas hibrida, karena padi hibrida berdasarkan potensinya memang lebih tinggi dibanding padi non hibrida. Namun demikian tidak semua petani mau menanam padi hibrida dengan beberapa alasan.

### **4. Terlambatnya Penyaluran Benih dari penyedia benih**

Keterbatasan benih di tingkat penyalur kadang-kadang juga menjadi faktor penghambat baik dari ketersediaan varietas, ketepatan penyaluran, ketepatan jumlah dan prosentase daya tumbuh.

### **5. Terbatasnya Tenaga Pendamping dan Tenaga Administrasi**

Kelompok tani yang menerima bansos cukup besar, jumlah kelompok tani pelaksana SLPTT padi, jagung dan kedelai setiap tahun hamper sekitar 1.000 kelompok tani setiap kelompok meneriman bansos dengan berbagai administrasinya, sementara jumlah tenaga administrasi yang terbatas. Sehingga tenaga pelaksana yang mengurus administrasi merasa kewalahan. Bendahara lama tahun 2010-2011 mengeluhkan tentang banyaknya

administrasi yang cukup banyak sementara tenaga terbatas. Bahkan bendahara baru tahun 2012 sampai 2014 bekerja sendirian untuk mengurus masalah administrasi, hal ini kadang-kadang mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan maupun pembuatan pertanggungjawaban (SPJ). Untuk itu, bendahara harus bekerja keras bahkan kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.

Demikian juga dengan tenaga lapang, petugas lapang Dinas Pertanian yaitu Mantri Tani. Tapi kenyataan yang terjadi, dari 22 orang Mantri Tani yang ada di 22 Kecamatan, Mantri Tani yang asli hanya 3 orang, sedangkan 19 orang Mantri Tani yang lain dirangkap oleh Penyuluh Pertanian (PPL) dan Petugas Hama dan Penyakit (Petugas POPT

6. Sumberdaya petani yang masih perlu ditingkatkan

Setiap 1 Unit SLPTT terdapat luasan 1 ha. yang digunakan untuk kegiatan Laboratorium Lapangan (LL) yang diharapkan dapat digunakan petani untuk uji coba dalam penerapan teknologi sesuai dengan spesifikasi lokasi. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan data yang ada, kegiatan LL tersebut teknologinya masih bersifat umum belum bersifat spesifikasi lokasi karena keterbatasan SDM petani dalam penguasaan teknologi, sehingga masih perlu pendampingan yang intensif kepada petani untuk peningkatan SDM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kab. Blitar dalam rangka mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan.
- b. Menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dan tersalurnya benih tanaman bersubsidi.
- c. Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi penerapan budidaya tanaman yang tepat
- d. Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan berintegritas.

### B. Saran

1. Agar kegiatan SLPTT dapat berkontribusi produksi pada tahun berjalan, disarankan agar mencari lokasi yang secara teknis kondisi air cukup pada musim hujan dan kepada pihak penyedia benih diharapkan dapat menyalurkan benih sesuai dengan jadwal yang termuat dalam Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
2. Untuk mengurangi permasalahan terkait perubahan kebijakan dari Pihak Pusat, agar pusat dalam menerbitkan DIPA maupun Petunjuk Pelaksanaan memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keinginan petani, dan bagi perencana di tingkat Kabupaten dalam menyusun perencanaan betul-betul memperhatikan aspirasi petani sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi.
3. Untuk memotivasi petani agar tertarik dan mau menanam padi hibrida, disarankan agar kualitas benih, varietas benih dan penyaluran benih sesuai dengan keinginan petani, disamping itu demplot benih padi hibrida perlu ditingkatkan

- sebagai sarana pembelajaran bagi petani.
4. Untuk menghindari keterlabatan penyaluran benih, agar penyedia benih jauh-jauh hari lebih menyiapkan ketersediaan benih baik dari jumlah maupun varietas benih berdasarkan CPCL yang ada.
  5. Sehubungan dengan banyaknya kelompok tani yang didampingi dan administrasi yang harus ditangani, maka hendaknya Dinas Pertanian Kab. Blitar memberikan perhatian pada penyediaan tenaga administrasi dan tenaga lapang yang cukup agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan tugasnya.
  6. Untuk lebih meningkatkan sumberdaya petani, agar penyuluhan maupun dalam bentuk pelatihan lebih diintensifkan termasuk demplot komoditas dengan teknologi spesifik lokasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2010. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Arifin, Bustanul, 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus dan Alternatif Strategi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Darwanto, Dwidjono H, 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 12 No. 2, hh 152-164.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2011. Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan TA 2011.
- \_\_\_\_\_, 2012. Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan TA 2012.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Karyana, Ayi, 2012. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 3 Nomor 1, hh.1-28.
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enar. si Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pertanian, 2011. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi). Didownload dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id) (11-11-2012).
- Moleong, Lexy J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permendagri No. 54 tahun 2010. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Permono, Sigit B, 2011. *Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pesisir dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana UB, Malang.
- Prastowo, Andi, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif*

*Rancangan Penelitian.* Ar-Ruzz  
Media, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995.  
*Perencanaan Pembangunan.*  
Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.